



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN LINDUNG (KPHL) HULU BATANGHARI

Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro KM.3 Pulakek Telp/Fax. (0755) 7140730
Website : dishut.sumbarprov.go.id Email : dishut@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

**PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA UNTUK PENGAMANAN KPH (DAK)
PADA UPTD KPHL HULU BATANGHARI**

**TAHUN ANGGARAN
2019**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA UNTUK PENGAMANAN KPH (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batanghari
DPA – SKPD	:	2.00.04.2.00.04.01.172.029
Program	:	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan	:	Pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Pengamanan KPH (DAK)
Masukan	:	Tersedianya dana Rp. 34.882.000,-
Keluaran	:	Jumlah Kendaraan Roda Dua Untuk Pengamanan Hutan
Hasil	:	Tersedianya Kendaraan Untuk Pengamanan KPH sejumlah 1 Unit
Kel.Sasaran Kegiatan	:	UPTD KPHL Hulu Batanghari

A. LATAR BELAKANG

Pembentukan KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada periode tahun 2017, yang dimulai dengan kegiatan kajian akademik, penyusunan rencana pengelolaan dan penyusunan buku tata hutan. Dalam periode tersebut, diusulkan pembentukan Organisasi Tata Kerja Kelembagaan KPH, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengisi Personil di UPTD KPHL Hulu Batanghari telah terbinya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administratur (Eselon III) di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 821/239/BKD-2018 tanggal 24 Januari 2018. Luas wilayah UPTD KPHL Hulu Batanghari adalah ± 185.434,00 Ha (Seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima) yang terdiri dari Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 97.580,81 Ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 66.290,23 Ha dan Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 21.562,95 Ha.

Dalam rangka percepatan operasional UPTD KPHL Hulu Batanghari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka sangat dibutuhkan Sarana dan Prasarana Operasional KPH karena UPTD KPHL Hulu Batanghari sampai saat ini masih sangat kekurangan dalam hal sarana dan prasarana serta dengan

mengingat sangat luas nya wilayah kelola UPTD KPHL Hulu Batanghari yang mencakup 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok.

B. TUJUAN

Tujuan dari Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Pengamanan KPH (DAK) ini adalah Dalam rangka percepatan operasional UPTD KPHL Hulu Batanghari serta memenuhi kekurangan Sarana dan Prasarana Operasional KPH.

C. DASAR PELAKSANAAN

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
- b. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 104/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat;
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Pengamanan Hutan (DAK) Nomor Rekening 2.00.04.2.00.04.01.172.029.

D. OUTPUT dan OUTCOME

No	Rincian Menu Kegiatan	Jumlah Penerima	Target Output	Target Outcome
1.	Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Pengamanan KPH (DAK)	1 Unit Kendaraan Roda Dua	1 Unit Sepeda Motor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Operasional pada UPTD KPHL Hulu Batanghari dengan adanya penambahan 1 unit Kendaraan Roda Dua

E. PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat dari Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Pengamanan KPH (DAK) ini adalah UPTD KPHL Hulu Batanghari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

F. SASARAN

Tersedianya Kendaraan Roda Dua Untuk Pengamanan Hutan pada UPTD KPHL Hulu Batanghari.

G. PENDANAAN

Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Pengamanan KPH (DAK) ini dibebankan kepada sumber dana DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kode Rekening Nomor 2.00.04.2.00.04.01.172.029.

II. RENCANA PELAKSANAAN

A. Uraian Kegiatan

Uraian Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Pengamanan KPH (DAK) sebagaimana tercantum dalam DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kode Rekening Nomor 2.00.04.2.00.04.01.172.029. adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua (5.2.3.17.0005) senilai Rp. 34.882.000,-

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Pengamanan KPH (DAK) pada UPTD KPHL Hulu Batanghari.

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Rencana pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Pengamanan KPH (DAK) dijadwalkan selama 5 (lima) bulan, seperti tabel dibawah ini

URAIAN	PELAKSANAAN KEGIATAN											
	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Dikt	Nov	Des
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Dua												

D. Pelaksana Kegiatan

1. Penanggung Jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung Jawab Kegiatan/KPA : Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Batanghari
3. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Bendaharawan : Bendaharawan Pengeluaran Anggaran DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
5. Anggota : Seluruh Staf seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

III. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Pengamanan KPH (DAK) dilakukan berdasarkan jenis belanja/mata anggaran yang terdapat dalam DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua (5.2.3.17.0005) senilai Rp. 34.882.000,- dilaksanakan melalui pembayaran LS melalui nomor rekening pengada/ Kontraktor.

Sebagai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud, pelaksana membuat laporan hasil pelaksanaan dan administrasi pendukung kegiatan lainnya.

IV. METODE PELAKSANAAN

Adapun Metode Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk Pengamanan KPH (DAK) tahun 2019 ini adalah dengan metode Pengadaan Langsung.

Muara Labuh, Januari 2019
Kuasa Pengguna Anggaran


HAMDANI, S.Sos
NIP. 19641119 198603 1 003